

PUTUSAN
Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang- Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-VIII/2010

Nama : Darmawan, M.M.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Juli 1949
Agama : Katholik
Pekerjaan : Penulis buku
Tempat Tinggal : Jalan Jatayu Dalam II/5 Bandung 40174, Jawa Barat.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2010, memberi kuasa kepada 1) Fatahillah, S.H.; 2) FX. Teguh Darmawan, S.H.; 3) Margareta Gita Darmawan, S.H.; dan 4) Rachmat Bagja, S.H., LL.M. Semuanya adalah para Advokat, yang berdomisili hukum di Jalan Setiabudi 5 Gang II Nomor 10a, Setiabudi, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama ataupun sendirisendiri bertindak selaku kuasa hukum Pemohon.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

[1.3] Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-VIII/2010

1. Nama : Muhammad Chozin Amirullah, S.Pi.,
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 Juni 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO
Alamat : Jalan Dukuh Serut RT/RW 03/06 Desa Tegalontar, Kecamatan Seragi, Pekalongan;

Disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Adhel Setiawan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 19 Desember 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa dan Pengurus PB HMI MPO
Alamat : Jalan Rawasari VII Nomor 30 RT/RW 12/05, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Disebut sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Eva Irma Muzdalifah
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 19 Juni 1986
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa dan Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta

Alamat : Jalan Sukabumi-Cianjur, Kampung Cikajona, RT/RW 01/02,
Kelurahan Langen Sari, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Sukabumi;

Disebut sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : Syafrimal Akbar Dalimunthe
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 07 Desember 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa dan Ketua Umum HMI MPO Cabang Bogor
Alamat : Jalan Sadewa Nomor 53, RT/RW 003/008, Kelurahan
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok

Disebut sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : Muhidin M. Dahlan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 12 Mei 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Penulis
Alamat : Kembaran RT 02,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55183;

Disebut sebagai ----- Pemohon V;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Januari 2010, memberi Kuasa Khusus kepada
1) Gatot Goei, S.H.; 2) A. Wakil Kamal, S.H., M.H.; 3) Ardi Manto, S.H.; 4) Guntoro, S.H.;
5) Hesty Komala Ningrum, S.H.; 6) Muhammad Muhyidin, S.Hi.; 7) Teguh Nugroho, S.H.;
8) Emir Zullarwan Pohan, S.H.; 9) Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si.; 10) Elly Suhartini, S.H.;
11) Achmad Ilyas, S.H.; dan 12) M. Ridwan, S.Hi. Kesemuanya adalah Advokat dan
Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi dan
Berpendapat HMI-MPO (TAKBIR HMI-MPO) yang memilih domisili hukum di Pohan &
Goei Law Office, Gedung Arthaloka Lantai 16, Suite 1610, Jalan Jenderal Sudirman Kav 2,
Jakarta Pusat, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku kuasa para
Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai----- para Pemohon II;

[1.4] Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010

1. Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), yaitu Organisasi Non Pemerintah yang didirikan di
Jakarta pada tanggal 10 November 2003 dan diresmikan sebagai Badan Hukum berbentuk
Yayasan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris B. Andy Widyanto, S.H, Nomor 17 tanggal 18
Juni 2009, berkedudukan di Jalan Inerbang Raya Nomor 4 RT/RW 010/005, Batu Ampar,
Kramat Jati, Jakarta Timur 13521. Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : I Gusti Agung Ayu Ratih, M.A
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 19 Maret 1966
Pekerjaan : Ketua Pengurus Institut Sejarah Sosial Indonesia;
Alamat : Jalan Batu Kramat Nomor 19, RT/RW 011/005, Batu Ampar,
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520,

2. Nama : Rhoma Dwi Aria Yuliantri
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Kulon Progo, 4 Juli 1982
Pekerjaan : Karyawan swasta, peneliti, dan

penulis buku
Alamat : Pugeran RT/RW001/064, Desa Maguwoharjo, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Januari 2010 memberi Kuasa Khusus kepada
1) Taufik Basari, S.H., S.Hum.; LL.M.; 2) Nursyahbani Katjasungkana, S.H.; 3) Nurkholis
Hidayat, S.H.; 4) Febi Yonesta, S.H.; 5) Kiagus Ahmad BS, S.H.; 6) Wahyu Wagiman, S.Hi.;
7) Indriaswati Dyah S, S.H., LL.M.; 8) Ali Nursahid, S.H.I.; 9. Wahyudi Djafar, S.H.; 10)
Romi Leo Rinaldo, S.H.; 11) Fajri Partama, S.H.; 12) Chrisbiantoro, S.H.; 13) Restaria F.
Hutabarat, S.H., M.A.; 14) Tomy Albert Tobing, S.H.; 15) Muhamad Isnur, S.H.I.; 16)
Answer C. Styannes, S.H.; 17) Hendrayana, S.H.; 18) Sholeh Ali, S.H.; 19) Sri Suparyati,
S.H., LL.M.; 20) Rinto Tri Hasworo, S.H.; 21) Alghiffari Aqsa, S.H.; 22) Yati Andriyani,
S.H.; 23) Fransiska, S.H.; 24) Nur Annissa Rizki S, S.H.; 25) Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.;
dan 26) Ikhana Indah B, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum, yang tergabung dalam “Tim
Advokasi Tolak Pelarangan Buku” yang memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro
Nomor 74, Jakarta Pusat, baik bertindak secara sendirisendiri
maupun bersama-sama selaku kuasa para Pemohon;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;
Seluruhnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait (Kejaksaan Agung Republik
Indonesia);
Mendengar keterangan ahli serta para saksi dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Permohonan para Pemohon II

Bahwa Pemohon V adalah Penulis Buku Lekra Tak Membakar Buku, Suara Senyap Lembar
Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 dan buku-buku lainnya.

Sebagai penulis, Pemohon V dirugikan dengan adanya ketentuan pelarangan dan pengawasan
terhadap barang cetakan dalam UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004 oleh karena pikiran dalam
buku Pemohon V dianggap terlarang.

Jaminan hak konstitusional Pemohon V sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan
ayat (3) UUD 1945 terkait dengan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati
nuraninya dan mengeluarkan pendapat jelas telah dirugikan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, para Pemohon sebagai perorangan dan warga negara
Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara”.

Bahwa ketentuan mengenai kepentingan hukum (legal standing), selain diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut: “Permohonan dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:

a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama

b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU.

c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

d) Lembaga negara”.

Bahwa syarat perorangan dan warga negara Indonesia telah dipenuhi oleh para Pemohon berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

III. Alasan Kerugian Konstitusional para Pemohon II

Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon telah diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusanputusan selanjutnya, yang memberikan batasan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi “

A. Hak Konstitusional para Pemohon yang Diberikan UUD 1945 dan yang dirugikan oleh UU 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004

Bahwa hak konstitusional para Pemohon diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi tidak tegak.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang juga diberikan oleh Pasal 28F UUD 1945 adalah hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah informasi menjadi tidak terwujud.

Bahwa hak konstitusional Pemohon V yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dan kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi

terhambat oleh karena adanya pelarangan dan pengawasan terhadap hasil karya Pemohon V dengan menggunakan UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004.

Bahwa dengan demikian hak konstitusional para Pemohon yang diberikan dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), 28F dan 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan dan dilanggar oleh Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004.

B. Kerugian Konstitusional dan Potensi Kerugian

Bahwa para Pemohon yang hak konstitusionalnya dirugikan mengalami kerugian berupa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah informasi dari barang-barang cetakan. Secara pribadi untuk pengembangan diri dan pengetahuan para Pemohon menjadi tidak bertambah dan terhambat.

Bahwa Pemohon V, dengan adanya pelarangan dan pengawasan barang cetakan sebagaimana diatur dalam UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004 tidak dapat menyebarluaskan pikiran dan pendapatnya dalam bentuk tulisan kepada masyarakat luas. Penyebaran pikiran Pemohon V sangat penting dilakukan agar kebenaran sejarah dapat diketahui oleh generasi muda dimasa mendatang.

Bahwa selain itu para Pemohon juga dirugikan karena proses pelarangan dan pengawasan barang cetakan tidak mengikuti proses hukum yang benar (*due process law*). Sehingga mengakibatkan kerugian para Pemohon berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi tidak dipenuhi.

Bahwa kerugian potensial juga berupa kekhawatiran yang akan terjadi dimasa mendatang, jika UU yang melanggar hak konstitusional para Pemohon masih berlaku. Selain akan menimbulkan dampak pada hilangnya hak komunikasi, informasi dan pengembangan diri, terdapat pula ancaman pidana bagi para Pemohon. Para Pemohon dan masyarakat akan tidak berkembang, terancam dikriminalisasikan dan pembodohan yang disebabkan oleh pelarangan dan pengawasan barang cetakan yang diatur dalam UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004.

C. Hubungan Sebab Akibat (*causal verband*) Antara Kerugian dan Berlakunya Undang-Undang yang Dimohonkan Untuk Diuji

1. Fakta-fakta Hukum

Bahwa Kejaksaan Agung mendapatkan kewenangan melakukan pelarangan dan pengawasan barang cetakan berdasarkan pada UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004. Merujuk pada ketentuan undang-undang ini, Kejaksaan Agung

telah melakukan pelarangan dan pengawasan barang cetakan, berupa buku beberapa waktu yang lalu. Hal ini dapat diketahui dari siaran pers yang

disampaikan oleh Kejaksaan Agung, yang isinya sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan laporan tahunan terkait dengan pelarangan peredaran dan pengadaan barang cetakan yang terdiri dari 5 (lima) buhantara lain:

Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-139/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, karangan John Roosa, Penerjemah Hersiri Setiawan, Penerbit Institut Sejarah Sosial Indonesia Jalan Pinang Ranti Nomor 3 Jakarta, Hasta Mitra Jalan Duren Tiga Selatan Nomor 36 Jakarta Selatan di seluruh Indonesia.

· Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-140/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, tetesan Darah dan cucuran Air Mata Umat Tuhan Di Papua Barat Harus Diakhiri, Karangan Socratez Sofyan Yoman, Penerbit Reza Enterprise Jalan Penggalang VIII Nomor 38 Jakarta Timur diseluruh Indonesia.

· **Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-141/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965, Karangan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, Penerbit Merakesumba Lukamu Sakitku Pugeran Maguwoharjo Jogjakarta, Desain Sampul Eddy Susanto diseluruh Indonesia.**

· Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-142/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan, karangan Darmawan, MM, Penerbit PT. Hikayat Dunia Jalan Jatayu Dalam II/5 Bandung, Perwakilan Jakarta Jalan Kayumanis VII Nomor 40 Jakarta Timur, Pencetak PT. Karyamanunggal Lithomas Bandung di seluruh Indonesia.

· Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-143/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Mengungkap Misteri Keberagaman Agama, karangan Drs. H. Syahrudin Ahmad, Penerbit Yayasan Kajian Al-Qur'an Siranindi (YKQS) Palu Jalan Jambu Nomor 50 Palu Sulawesi Tengah di seluruh Indonesia.

b. Bahwa bagi mereka yang menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan barang cetakan tersebut untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri setempat. Bagi yang melanggar perintah tersebut maka akan dikenai ancaman pidana hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tanggal 23 april 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

c. Bahwa kriteria pelarangan 5 (lima) buku di atas berpedoman pada adanya gangguan ketertiban umum yang harus didasarkan dengan ketertiban kehidupan masyarakat dan negara, yang diprediksikan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, memajukan percabulan serta terganggunya ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Bahwa dimasa sebelumnya berdasarkan data rekap pelarangan buku pada masa lalu yang dihimpun oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) tahun 2006 dan telah di kutip oleh beberapa situs online, menjelaskan bahwasannya tindakan pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut buku-buku yang dilarang pada masa orde baru: 1. Bumi Manusia (1980) karya Pramoedya Ananta Toer; 2. Anak Semua Bangsa (1981) karya Pramoedya Ananta Toer, Komunis dan Marxist; 3. Jejak Langkah (1985) karya Pramoedya Ananta Toer, Komunis dan Marxist; 4. Rumah Kaca (1988) karya Pramoedya Ananta Toer, Komunis dan Marxist; 5. Arus Balik (1995) karya Pramoedya Ananta Toer; 6. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1995-1996) karya Pramoedya Ananta Toer (Naskah asli berjudul "Nyanyi Tunggal Seorang Bisu" dibuat tahun 1991; 7. Di Tepi Kali Bekasi (1947) karya Pramoedya Ananta Toer; 8. Perburuan (1950) karya Pramoedya Ananta Toer; 9. Keluarga Gerilya (1950) karya Pramoedya Ananta Toer; 10. Percikan Revolusi (1950) karya Pramoedya Ananta Toer; 11. Subuh (1950) karya Pramoedya Ananta Toer; 12. Bukan Pasar Malam (1951) karya Pramoedya Ananta Toer; 13. Mereka yang Dilumpuhkan (1951) karya Pramoedya Ananta Toer; 14. Cerita dari Blora (1952) Pramoedya Ananta Toer; 15. Korupsi (1954) karya Pramoedya Ananta Toer; 16. Cerita dari Jakarta (1957) karya Pramoedya Ananta Toer; 17. Serat Darmogandul; 18. Suluk Gatoloco; 19. Buku Putih Perjuangan Mahasiswa Indonesia KM ITB 1979; 20. Apakah Soeharto

Terlibat Peristiwa PKI; 21. Bayang-bayang PKI (1995) karya Institut Studi Arus Informasi disunting Stanley; 22. Madame D Syuga; 23. Painting in Islam; 24. Dosa dan Penebusan Menurut Islam dan Kristen; 25. Kristus Dalam Injil dan Al Quran; 26. Mujarobat Ampuh; 27. Berhati-hati Membuat Tuduhan; 28. Menyingkap Sosok Misionaris; 29. Sajian Tuntutan Tuhan pada Akhir Zaman; 30. Aurad Muhammadiyah; 31. Memoar Oei Tjoe Tat (1995); 32. Islamic Invation karya Robert Morey; 33. Di Balik Jeruji Besi diterbitkan Yayasan Kalimatullah; 34. Alkitabul Muqodas diterbitkan Yayasan Kalimatullah; 35. Kesaksian Al Quran diterbitkan Yayasan Kalimatullah; dan 36. Tuanku Rao (1967) karya Parlindungan. Sumber: <http://sawali.info/2010/01/08/pelarangan-buku-dan-tragedi-pencerdasan/> dikutip dari <http://fotounik.net/daftar-buku-yang-dilarang-beredar-oleh-penguasa-indonesia-gurita-cikeas-menyusul/> dikutip dari PBHI 2006.

1. Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelarangan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap 5 (lima) buku dan buku-buku lainnya dengan menggunakan UU Nomor 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004.

Bahwa pelarangan dan pengawasan barang cetakan di atas tidak melalui sebuah proses penegakan hukum yang benar. Seharusnya pelarangan dan pengawasan Barang Cetakan tersebut dilakukan melalui proses penegakan hukum bukan seperti yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004.

Bahwa sebagaimana telah diketahui, dalam suatu Negara yang berdasarkan pada Konstitusi dan Hukum, maka warga negara dijamin untuk memperoleh perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum. Jaminan ini dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *due process of law* yang menurut New Encyclopedia Britannica, 15th edition, adalah suatu rangkaian prosedur hukum yang mengacu pada peraturan dan prinsip-prinsip yang telah diadakan dalam suatu sistem hukum yang bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak individu atau warga negara.

Bahwa dalam prakteknya, *due process of law* berfungsi untuk menguji dan memeriksa terhadap ketepatan penggunaan kekuasaan pemerintah (eksekutif) dalam melaksanakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi perlindungan dan penegakan hak-hak warga negara. Salah satu contohnya seperti dalam proses peradilan *a quo* antara lain untuk menguji dan memeriksa ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dalam *due process of law* bentuknya adalah penegakan hukum dalam sebuah sistem peradilan. Setiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum, maka masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tindakan melawan hukum kepada lembaga penegak hukum yang telah tersedia. Indonesia adalah negara yang telah menyediakan perangkat aparat penegak hukum, yang terbagi dalam aparat eksekutif (Polisi dan Jaksa) dan yudikatif (hakim) untuk mengungkap permasalahan secara adil dan benar.

Bahwa adanya peran eksekutif dan yudikatif di atas telah dibenarkan oleh Montesquieu yang menyatakan bahwa dalam negara yang sangat menghormati dan menegakkan kemerdekaan, maka kekuasaan legislative, executive dan judicial harus dipisahkan dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan kekuasaan

yang disebabkan adanya pemusatan kekuasaan pada lembaga atau kekuasaan tertentu dan memberikan perlindungan bagi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Bahwa sejalan dengan Montesquieu, bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum berarti menempatkan kehidupan berbangsa bernegara ini di bawah hukum dalam mencapai kehidupan yang adil. Struktur politik, ekonomi dan sosial dibangun berdasarkan perangkat hukum yang benar. Oleh karena itu menurutnya, untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat sistem hukum harus dibangun dan penegakan hukum (law enforcement) harus dilakukan sebagaimana mestinya. Bahwa dengan demikian negara hukum berarti salah satunya adalah penegakan hukum (law enforcement) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun Faktanya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 jelas tidak menunjukkan adanya proses penegakan hukum yang benar, dimana Kejaksaan Agung dapat melakukan tindakan hukum tanpa melalui sebuah proses penegakan hukum. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” menegaskan bahwa penegakan hukum melibatkan pula kekuasaan yudikatif untuk menilai dan memutus sebuah perbuatan.

Bahwa oleh karena itu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tindakan hukum dilakukan tanpa melalui penegakan hukum yang benar sehingga hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dirugikan.

2. Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 juncto. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945

Bahwa ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melarang dan mengawasi beredar nya buku adalah ketentuan yang melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah informasi yang dijamin oleh UUD 1945; Bahwa menurut Claud Adrian Helvetius (1715-1771), seorang filsuf Perancis yang dikutip dalam buku Advokasi Kebebasan Pers (Perjalanan 6 tahun LBH Pers), terbitan tahun 2009, halaman 33, mengatakan bahwa: “Membatasi pers berarti menghina bangsa dan membatasi membaca buku-buku tertentu, berarti menyatakan rakyat adalah orang-orang bodoh atau budak”. Dengan demikian apa yang dinyatakan oleh Claud Adrian Helvetius jika dikaitkan dengan UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004 yang memberikan kewenangan pelarangan dan pengawasan terhadap buku-buku sejatinya sedang menyatakan rakyat bodoh dan secara aktif melakukan pembodohan kepada rakyat serta memposisikan rakyat harus tunduk dan patuh terhadap keputusan pemerintah.

Bahwa sejalan dengan Claud Adrian Helvetius, para Pemohon jelas menentang pembodohan dan pembungkaman melalui pelarangan buku. Dengan adanya pelarangan buku maka para Pemohon berkepentingan untuk merebut hak informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah informasi yang dikebiri oleh UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004.

Bahwa para Pemohon dalam Khitah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) telah diuraikan tentang keharusan menggali wawasan sosial untuk mengetahui dan terlibat dalam pengembangan masyarakat dari tahun ke tahun dan abad ke abad. Tujuannya tidak lain agar kader HMI MPO dapat melakukan perubahan di masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih maju dalam pemikiran dan lebih beradab dalam pergaulan. Wawasan sosial didapat dari segala macam referensi, salah satu referensi utamanya adalah buku.

Bahwa dalam setiap pelatihan kader HMI MPO diwajibkan untuk senantiasa tidak membatasi diri dalam mengembangkan pemikiran. Ini yang sering disebut dalam proses kaderasi pencapaian insan ulil albab. Sosok yang terbentuk kesholehannya dalam bentuk ibadah-ibadah dan cerdas dalam berfikir. Referensi utama pembentukan kader ulil albab berasal dari barang-barang cetakan. Oleh karena itu jika terjadi pelarangan dan pengawasan terhadap buku-buku maka keinginan untuk menciptakan insan ulil albab, di mana diharapkan sosok ini akan melakukan perubahan di masyarakat dan membangun peradaban yang lebih baik menjadi terhambat.

Bahwa dengan demikian Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 karena hak Konstitusional para Pemohon berupa hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dirugikan dan dilanggar.

3. Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 juncto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Bahwa kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Kemerdekaan ini menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah suatu hak yang apabila tidak dipenuhi maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar dalam kualitasnya yang utuh sebagai manusia. Manusia baru dapat dikatakan utuh sebagai manusia jika kebebasannya untuk berkomunikasi dan berpendapat telah terpenuhi.

Bahwa Indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam undang-undang tersebut telah dinyatakan bahwa hak-hak sipil politik warga negara yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik telah diakui. Dengan demikian seharusnya pemerintah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan kebebasan yang telah dijamin dalam konstitusi, terutama terhadap UU Nomor 4/PNPS/1963 dan UU Nomor 16/2004 yang mengatur tentang pelarangan dan pengawasan buku.

Bahwa UU Nomor 4/PNPS/1963 dan UU Nomor 16/2004 jelas sudah tidak sejalan dan harmonis lagi dengan prinsip kebebasan yang telah dianut dalam sistem hukum nasional saat sekarang. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional kepada setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat.

Bahwa sehubungan dengan jaminan konstitusi terhadap Pemohon V dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka hak konstitusional Pemohon V untuk menulis buku berjudul *Lekra Tak Membakar Buku*; *Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965*,

bersama Rhoma Dwi Aria Yuliantri dimaksudkan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani dan sebuah pendapat Pemohon V yang ditulis dengan pendekatan penulisan ilmiah.

Bahwa Pemohon V sebagai alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)- MPO telah mendapatkan kaderisasi dari organisasi HMI untuk senantiasa mengungkap kebenaran yang dituangkan dalam pemikiran dan perbuatan. Dalam bentuk pemikiran dituangkan dalam tulisan dan perbuatan dituangkan dalam lisan yang telah menjadi prinsip dalam organisasi ke-HMI-an.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon V yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

III. PENDAPAT HUKUM

3. Kerja sama Kejaksaan Agung R.I, Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan Kepolisian, serta Tenaga Ahli.

Bahwa dalam melakukan pengawasan barang cetakan, praktik selama ini telah dibentuk sebuah badan bernama Clearing House. Komposisi Clearing House melibatkan multi-institusi seperti Kepolisian, Badan Intelijen Negara, TNI, Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Komunikasi dan Informasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kejaksaan Agung R.I, dapat menerima laporan masyarakat, permintaan dari instansi lain, maupun pro aktif.

Berdasarkan mekanisme dan struktur kerja di Kejaksaan, pelarangan buku secara prosedural mengikuti proses demikian:

1). Berdasarkan laporan masyarakat, permintaan dari instansi lain, maupun secara proaktif, Sub-Direktorat Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan yang berada di bawah Direktorat Sosial Politik dan pada gilirannya di bawah Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) akan melakukan penelitian. Dari penelitian itu dihasilkan rekomendasi yang berisi keterangan judul buku, pengarang, penerbit, dan isi ringkasannya, serta permasalahan dan analisis.

2) Rekomendasi itu dibawa ke Clearing House (CH) yang diketuai JAM Intelijen, Direktur Sosial Politik sebagai ketua pelaksana dan Kepala Subdit Pengamanan Media Massa dan Barang Cetakan sebagai Sekretaris, serta anggota tetap dari luar, yakni dari Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan Kepolisian, serta Tenaga Ahli sesuai objek kajian Tugas CH adalah mengkaji dan memberi rekomendasi/masukan kepada Jaksa Agung sebagai dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam hal menentukan pelarangan buku yang dikaji, yang hasilnya dibuatkan berita acara dan ditandatangani seluruh anggota. Hasil itu disampaikan kepada Jaksa Agung melalui JAM Intelijen. Berdasarkan pendapat dan saran dari CH, Jaksa Agung mengambil langkah berikutnya, yaitu mengeluarkan SK pelarangan peredaran suatu terbitan atau barang cetakan bila dianggap mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. misalnya dalam buku berjudul:

5. "LEKRA TAK MEMBAKAR BUKU Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950 - 1965", karangan RHOMA DWI ARIA YULIANTRI dan MUHIDIN M. DAHLAN, hal hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Sampul buku bagian depan memuat gambar Palu Arit yang cukup besar berwarna putih (sama dengan warna sampul buku);

2. Sub judul Lekra "Bukan" PKI (hal. 59);
3. Tak hanya bubar, semua anggota partai yang mengusungnya tinggi-tinggi diburu, ditangkap, dipenjarakan, dan ditombak, disembelih, dan ditembak. (hal. 101);
4. Di masa gelap ini, Berita Yudha dan Angkatan Bersendjata bahu-membahu meniup terompet ke seluruh penjuru negeri untuk melakukan pengganyangan kepada semua orang yang terdaftar sebagai PKI atau simpatisannya. (hal. 101);

Dari analisa pernyataan-pernyataan di atas, buku tersebut dikategorikan meresahkan pembaca karena:

1. Sampul buku bagian depannya memuat gambar Palu Arit yang cukup besar berwarna putih (sama dengan warna sampul buku);
2. Mencantumkan istilah "G 30 S" atau "Gerakan 30 September" atau "Gerakan 30 September 1965" tanpa diikuti sebutan "PKI";
3. Mengdiskreditkan Pemerintah, khususnya Angkatan Bersenjata dengan tuduhan telah melakukan penghukuman penjara puluhan tahun, pengejaran, penggorokan leher, dan penembakan-penembakan sistematik, serta mengatur aksi massa yang sangat brutal terhadap para budayawan;

Di antara para anggota CH pun, masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengawasi barang cetakan seperti pada Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai standar untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap kualitas buku pendidikan. Begitu pula yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Agama, maupun Badan Intelijen Negara (hanya yang berkaitan dengan masalah teroris) melakukan juga penelitian secara internal terhadap buku-buku/barang cetakan sesuai wewenang masing-masing instansi tersebut. Kerja sama antara instansi tersebut dalam wadah CH adalah untuk menjamin secara profesional dan objektif hasil kajian dalam rangka pengawasan barang cetakan demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Untuk masalah diluar barang cetakanpun ada instansi yang khusus mengawasinya hal seperti itu seperti Badan Sensor Film.

Apabila setelah melihat contoh buku-buku yang dilarang tersebut diatas, dimana materinya ada yang mengandung hujatan terhadap agama tertentu, penghinaan, maupun mengdiskreditkan Pemerintah tanpa didukung bukti, menghasut rakyat dan umat beragama, mengadu domba dan sebagainya, tidak perlu diadakan pengawasan lagi, maka tidak dapat dibayangkan akibatnya bagi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, hanya karena demi kepentingan satu orang atau golongan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Apakah hal-hal tersebut patut didiamkan begitu saja. Apakah negara tidak mempunyai peranan untuk melindungi warga negaranya terhadap adanya upaya-upaya tersebut yang akan merusak rasa persatuan tanpa melihat kondisi Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama maupun latar pendidikan yang beraneka ragam pula. Hanya karena negara mendiamkan saja terhadap orang yang menuntut kebebasan mengeluarkan pendapat yang dapat mengganggu ketertiban umum sehingga secara keseluruhan dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia yang multi etnik maupun multi agama, maka tidak akan terdengar lagi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum diatas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan pengujian formil oleh para Pemohon tidak dapat diterima;
- Permohonan pengujian materiil oleh para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533) juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533) juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ditolak;
- Menolak permohonan para Pemohon pengujian materiil untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan di ucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.
Maria Farida Indrati
ttd.
Hamdan Zoelva
ttd.
Harjono
ttd.
M. Akil Mochtar
249
ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan ini, seorang Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:

Isu konstitusional utama yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah apakah wewenang Jaksa Agung untuk melarang peredaran barang cetakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Untuk menjawab persoalan konstitusional tersebut, menurut pendapat saya, ada dua persoalan pokok yang harus dijawab terlebih dahulu, yaitu:

1. Konstitusionalakah pelarangan peredaran barang cetakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum? dan
2. Konstitusionalakah kewenangan Jaksa Agung melakukan pelarangan peredaran barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum ?

Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berpendapat kewenangan Jaksa Agung yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4/PPS/1963 adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan setelah adanya ijin dari pengadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, saya berkesimpulan bahwa prinsip kemaslahatan umum, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan perkara ini. Walaupun saya memiliki pendapat yang sama bahwa Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 adalah bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi Undang-Undang a quo perlu dipertahankan paling tidak untuk sementara sampai adanya undang-undang pengganti yang lebih baik yang dibuat DPR dan Presiden - untuk menghindari adanya kekosongan hukum, jika terjadi peredaran barang cetakan yang nyata-nyata atau potensial pasti menimbulkan kekacauan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Negara dalam hal ini pemerintah yang berkewajiban menegakkan ketertiban umum, harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan pelarangan terhadap barang cetakan yang nyata-nyata atau potensial pasti mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Kewenangan ini tidak dapat diserahkan kepada pengadilan, karena pengadilan adalah institusi yang menegakkan hukum dan keadilan, bukan institusi yang menegakkan ketertiban umum. Peran pengadilan hanya sebatas mengontrol pelaksanaan penegakkan ketertiban umum, apakah telah memenuhi prosedur hukum (due process of law) dan memnuhi prinsip keadilan. Karena itulah, untuk menghindari tindakan eksekutif dari pemerintah (Jaksa Agung) dalam pelarangan barang cetakan harus ada pembatasan yang jelas yaitu harus terlebih dahulu mendapat penetapan izin pengadilan negeri dan berdasarkan pada alasan yang jelas dan pasti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas saya berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai :

1. Wewenang jaksa agung untuk melarang peredaran barang cetakan hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan.
2. Alasan melanggar ketertiban umum paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 - a. Perbuatan mengedarkan barang cetakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang;
 - b. Akibat peredaran barang cetakan tersebut menimbulkan terganggunya ketertiban umum.
 - c. Terganggunya ketertiban umum tersebut harus nyata atau potensial pasti terjadi.

Sepanjang kedua persyaratan konstitusional tersebut dipenuhi, tidak ada norma dalam seluruh pasal UU Nomor 4/PNPS/1963 yang bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap permohonan para Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, saya memiliki pertimbangan dan pendapat yang sama bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para pemohon ditolak.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin

Putusan RPH: Pnps Pelarangan Buku dikabulkan seluruhnya

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.4 TAHUN 1963.
TENTANG
PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN
YANG ISINYA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM**

Menimbang:

- 1.bahwa barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum akan membawa pengaruh buruk terhadap usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, karena itu perlu diadakan pengamanan terhadapnya;
- 2.bahwa dianggap perlu Pemerintah dapat mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri, dalam rangka menyelamatkan jalannya Revolusi Indonesia;

Menimbang pula:

bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka pengamanan jalannya revolusi dalam mencapai tujuannya, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden;

Memutuskan:

Menetapkan:Penetapan Presiden Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Pasal 1

- (1)Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2)Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut. dicantumkan dalam Berita-Negara.
- (3)Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkan larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.

Pasal 2

- (1)Dalam waktu 48 jam setelah selesai dicetak, maka pencetak wajib mengirimkan satu exemplar barang cetakan yang dicetak, yang jenisnya tercantum dalam ayat (3), kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan dibubuhi tanda-tangan pencetak.
- (2)Dalam hal barang cetakan dicetak di luar negeri tetapi diterbitkan di Indonesia, maka kewajiban tersebut ayat (1) di atas jatuh pada penerbitan di Indonesia.
- (3)Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, penerbitan-penerbitan berkala, pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat yang dimaksudkan untuk disebar atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai dan barang-barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang ditentukan dalam pasal ini.
- (4)Pelanggaran atas ketentuan ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 3

- (1) Setiap barang cetakan harus dibubuhi nama dan alamat si pencetak dan penerbitnya.
- (2) Pencetak yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 4

Menteri Jaksa Agung berwenang untuk menunjuk barang cetakan dari luar negeri yang tertentu untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum diedarkan di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dengan suatu keputusan, Menteri Jaksa Agung dapat membatasi jenis-jenis barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri.
- (2) Yang dimaksudkan dengan jenis barang cetakan dalam pasal ini ialah jenis yang didasarkan atas jenis bahasa, huruf atau asal dari barang cetakan.

Pasal 6

Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum.

Pasal 7

Apabila Menteri Jaksa Agung tidak menetapkan lain, maka barang-barang cetakan terlarang berasal dari luar Indonesia yang berada dalam kekuasaan kantor-kantor pos dikembalikan kepada alamat si pengirimnya di luar negeri.

Pasal 8

Yang dimaksudkan dengan barang cetakan dalam Penetapan ini ialah tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang diperbanyak dengan mesin atau alat-alat kimia.

Pasal 9

Barang cetakan yang dikeluarkan oleh atau untuk keperluan Negara dikecualikan dari penetapan ini.

Pasal 10

Semua ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam Penetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 1963
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 April 1963
Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 2533

(Penjelasan Atas [Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23](#))

PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.4 TAHUN 1963.
TENTANG
PENGAMANAN TERHADAP BARANG-BARANG CETAKAN
YANG ISINYA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM.

PENJELASAN UMUM.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghadapi barang-barang cetakan baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang isinya membahayakan kepentingan Rakyat dan Negara.

Tidak jarang penerbitan-penerbitan asing yang masuk ke Indonesia melancarkan kecaman dan hinaan terhadap Rakyat dan Negara; merusak kepercayaan Rakyat terhadap Revolusi, pimpinannya dan Sosialisme yang dibina bersama antara Rakyat dan Negara, hal mana penyebarannya di Indonesia harus dicegah.

Selebaran-selebaran yang bersifat subversief baik berasal dari dalam dan luar negeri masih perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, juga bacaan-bacaan yang isinya dapat merusak akhlak.

Ketentuan ini sekali-kali tidak dimaksudkan untuk memungkinkan diadakannya sensor preventief oleh Pemerintah terhadap penerbitan dalam negeri; akan tetapi dengan ketentuan ini Pemerintah dapat bertindak cepat apabila terdapat barang cetakan dari dalam negeri yang isinya dapat membahayakan kepentingan Rakyat dan Negara yang sedang membina Sosialisme.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengertian "mengganggu ketertiban umum" haruslah dihubungkan dengan dasar-dasar tata-tertib kehidupan dari Rakyat dan Negara pada suatu saat. Merusak kepercayaan Rakyat terhadap Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan Nasional adalah contoh terkemuka akan tetapi tidak satu-satunya dari pengertian mengganggu ketertiban umum. Tulisan-tulisan dan gambar yang merugikan akhlak dan memajukan pencabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut. Jenis-jenis tulisan apa yang tidak dapat ditolerir untuk dibaca oleh masyarakat, sangat erat pula hubungannya dengan kesadaran hukum Rakyat pada suatu ketika, dengan peristiwa-peristiwa yang dialami Rakyat dan Negara, dengan kepribadian Indonesia dan lain-lainnya.

Apakah sesuatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum, diserahkan kepada Menteri/Jaksa Agung untuk menilainya.

Pasal 2

Barang cetakan yang wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan adalah terbatas seperti yang dicantumkan dalam pasal 2. Jadi tidak semua barang cetakan dimaksudkan oleh pasal 8 wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan setempat. Akan tetapi wewenang Menteri Jaksa Agung untuk melarang barang cetakan yang tersebut dalam pasal 1 tidak dibatasi oleh jenis-jenis barang cetakan yang wajib dikirimkan contohnya kepada Kejaksaan.

Pasal 3

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 4

Dengan ketentuan pasal ini dimungkinkan untuk melakukan penyaringan terhadap barang-barang cetakan yang akan dimasukkan ke Indonesia.

Pasal 5 sampai 9.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam Penetapan ini antara lain:

a. Bepalingen op den invoer verspreiding binnen Indonesia van gevaarlyke buitenlandse drukwerken, S. 1900-317 jo. 319.

b. Pasal 13 dari Reglement op de Drukwerken, S. 1956-74.

Pasal 11

Tidak memerlukan penjelasan.

Mengetahui:

Menteri/Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.)

nb. dibatalkan oleh MK (No. 6-13-20/PUU-VIII/2010)

ditetapkan menjadi: UU 4/Pnps/1963

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pengakuan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan Fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Pasal 3

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.

Pasal 4

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- (3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

BAB II
SUSUNAN KEJAKSAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang Kejaksaan negeri.
- (2) Cabang Kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.

Bagian Kedua

J a k s a

Pasal 8

- (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. pegawai negeri sipil.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa

menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, professional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”.

Pasal 11

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi.
- a. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta.
 - b. advokat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan atau pekerjaan yang dilarang dirangkap selain jabatan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 12

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;
- d. meninggal dunia;
- e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Pasal 13

- (1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - e. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 14

- (1) Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (3) Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela diri.

Pasal 15

(1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

(2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak fungsional jaksa yang terkena pemberhentian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Muda

Pasal 18

(1) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

(2) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.

(3) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.

(4) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

Pasal 19

(1) Jaksa Agung adalah pejabat negara.

(2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 20

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.

Pasal 21

Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:

- a. Pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturann perundang-undangan;
- b. Advokat;
- c. Wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terakait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;
- d. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;
- e. Notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;
- f. Arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan perturan perundangundangan;
- g. Pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau
- h. Pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

Pasal 22

(1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
- d. berakhir masa jabatannya;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 23

- (1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda, atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier.

Pasal 24

- (1) Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda adalah jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berpengalaman sebagai kepala kejaksaan tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan jabatan kepala kejaksaan tinggi.
- (3) Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan dengan syarat mempunyai keahlian tertentu.
- (4) Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - d. berakhir masa jabatannya;
 - e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dinilai melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Presiden atas usul Jaksa Agung dapat memberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebelum diambil tindakan pemberhentian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), berlaku pula terhadap Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.

Bagian Keempat

Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi,
Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 26

- (1) Kepala kejaksaan tinggi pimpinan kejaksaan tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- (2) Kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana.

Pasal 27

- (1) Kepala kejaksaan negeri adalah pimpinan kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- (2) Kepala kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala cabang kejaksaan negeri adalah pimpinan cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang membawahkannya.
- (4) Kepala cabang kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pelaksana.

Pasal 28

Yang dapat diangkat menjadi kepala Kejaksaan tinggi, wakil kepala Kejaksaan tinggi, kepala Kejaksaan negeri, dan kepala cabang Kejaksaan negeri adalah jaksa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

Bagian Kelima

Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli

Pasal 29

(1) Pada Kejaksaan dapat ditugaskan pegawai negeri yang tidak menduduki jabatan fungsional jaksa, yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung menurut perundang-undangan.

(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai tenaga ahli atau tenaga tata usaha untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

(3) Selain tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Kejaksaan dapat diangkat tenaga ahli bukan dari pegawai negeri.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 30

(1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak

hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Khusus

Pasal 35

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupi fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Pasal 37

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat sesuai dengan akuntabilitas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 38

Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.

Pasal 39

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh sebagai provinsi Nanghroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejaksaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tdd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2004
SEKERTARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 67
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

I. U M U M.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam usaha memperkuat prinsip di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur

dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sejalan dengan perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan beberapa undang-undang yang baru, serta berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan secara komprehensif dengan membentuk undang-undang yang baru.

Perubahan Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut di atas.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain :

1. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
2. Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
3. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.

5. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara merdeka” dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan yang harus dipertimbangkan perlunya percepatan layanan hukum kepada masyarakat dalam pembentukan cabang Kejaksaan, antara lain :

- a. wilayah hukum Kejaksaan negeri yang luas;
- b. kondisi geografis dan demografis; atau
- c. intensitas layanan tugas yang tinggi.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors* yaitu negara yang menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah direksi atau komisaris perusahaan, pemilik saham dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, atau memiliki saham tetapi saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan jalannya perusahaan.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit rohani dan jasmani terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jaksa diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “dipidana” ialah dijatuhi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaan” adalah apabila dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang sah.

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah sikap, perbuatan, dan tindakan jaksa yang bersangkutan baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau Kejaksaan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberhentian sementara” adalah tindakan memberhentikan sementara waktu sebagai jaksa, sampai adanya keputusan definitif dari Jaksa Agung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau keputusan Majelis Kehormatan Jaksa atas kesalahan yang bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)

Dengan adanya surat perintah penangkapan dan penahanan oleh pihak yang berwenang maka Jaksa Agung segera menyusuli dengan surat keputusan pemberhentian sementara.

Ayat (2)

Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan tindak pidana tertentu yang memberi wewenang kepada penyidik, penuntut umum, atau pengadilan untuk melakukan tindakan penahanan atas pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal seorang jaksa dituntut dimuka pengadilan karena melakukan salah satu tindak pidana tersebut, walaupun yang bersangkutan tidak ditahan, ia dapat dikenakan tindakan pemberhentian sementara.

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1).

Mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan ewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan.

Ayat (2).
Cukup jelas.
Ayat (3).

Yang dimaksud dengan “kesatuan unsur pimpinan” adalah wujud keterpaduan dan kebersamaan antara Jaksa Agung dan wakil Jaksa Agung dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat negara lain atau penyelenggara negara”, misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menteri, hakim, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah direksi atau komisaris perusahaan, pemilik saham dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, atau memiliki saham tetapi saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan jalannya perusahaan.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1).

Adanya jabatan Wakil Jaksa Agung akan sangat membantu Jaksa Agung khususnya dalam pembinaan administrasi sehari-hari dan segi-segi teknis operasional lainnya. Karena sifat tugasnya tersebut maka jabatan Wakil Jaksa Agung merupakan jabatan karier dalam lingkungan kejaksaan.

Ayat (2).
Cukup jelas.
Ayat (3).

Yang dimaksud dengan “yang dipersamakan” adalah jabatan yang setara dengan Eselon I.

Pasal 24
Ayat (1).
Cukup jelas.
Ayat (2).

Yang dimaksud dengan “jabatan yang dipersamakan dengan jabatan kepala kejaksaan tinggi” adalah jabatan kepala direktorat, kepala biro, atau jabatan lainnya yang setingkat.

Ayat (3).

Pada dasarnya jabatan Jaksa Agung Muda adalah jabatan karier. Ketentuan dalam ayat ini memberikan kemungkinan pengangkatan seorang Jaksa Agung Muda dari luar lingkungan kejaksaan. Sifatnya sangat selektif dan berdasarkan kebutuhan serta pejabat tersebut mempunyai keahlian tertentu yang bermanfaat bagi pelaksana tugas dan wewenang kejaksaan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan pasal 12 huruf b.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2).

Yang dimaksud dengan “ tenaga ahli” adalah ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak dimaksudkan untuk memberikan “keterangan ahli” dalam suatu persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan “tenaga tata usaha “ adalah tenaga yang tidak melaksanakan fungsi jaksa.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1).

Huruf a

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Huruf b

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

Huruf d

Kewewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf e

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka,
- 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
- 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Ayat (3).

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “turut menyelenggarakan” adalah mencangkup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Kerjasama antara kejaksaan dengan instansi penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Huruf d

pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung. Diperlukannya izin dalam ketentuan ini oleh karena status tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum, misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan/atau pencegahan dan penangkalan. Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah tersangka atau terdakwa yang berada dalam tanggung jawab kejaksaan. Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani perawatan di dalam negeri tidak ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Selain rekomendasi dari dokter untuk berobat ke luar negeri, juga disyaratkan adanya jaminan tersangka atau terdakwa atau keluarganya berupa uang sejumlah kerugian negara yang diduga dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Pelaksananya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui rapat kerja.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “mengenai perkara pidana” dalam ketentuan ini adalah seluruh proses yang menjadi kewenangan kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4401